
Strategi Geopolitik Tiongkok melalui Kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI)

Janice Elysia¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini menganalisis manuver Tiongkok melalui kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) di Asia Tengah dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menerapkan teori *heartland* dan konsep kepentingan nasional guna mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok dalam meraih kepentingannya di Asia Tengah melalui implementasi kebijakan BRI. Teori *heartland* menjelaskan relevansinya dalam memahami dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya di wilayah Eurasia secara terperinci. Argumen dalam teori ini dihubungkan secara teoritis dengan konsep kepentingan nasional mengenai wilayah Asia Tengah sebagai *pivot point* kebijakan BRI yang memberikan signifikansi geopolitik bagi Tiongkok. Berbagai lembaga, organisasi, dan program yang diluncurkan Tiongkok merepresentasikan upaya-upaya aktualisasi keinginan Tiongkok memperkuat pengaruhnya di wilayah Asia Tengah sekaligus menunjukkan kepentingan-kepentingan nasional yang ingin dicapai Tiongkok di wilayah tersebut. Keinginan tersebut dibuktikan dan diperkuat dengan kesesuaian antara rute BRI dan asumsi Mackinder menunjukkan bagaimana proyek masif ini memenuhi tujuan strategis jangka panjang Tiongkok untuk mencapai *global dominance*.

Kata-kunci : Tiongkok, Teori *Heartland*, *Belt & Road Initiative*, Kepentingan Nasional, *Global Dominance*

Abstract

This research analyzes China's maneuvers through the Belt & Road Initiative (BRI) policy in Central Asia using a qualitative approach. The study applies the heartland theory and the concept of national interest to understand the efforts undertaken by China to achieve its interest in Central Asia the implementation of the BRI policy. The Heartland theory, which elucidates power dynamics and resource distribution across Eurasia, is applied to understand China's rationale. The arguments in this theory are theoretically linked to the concept of national interest regarding Central Asia as the pivot point of the BRI policy, which provides geopolitical significance for China. Various institutions, organizations, and programs launched by China represent its efforts to strengthen its influence in the Central Asian Region while demonstrating the national interests

China aims to achieve in that area. These desires are evidenced and reinforced by the alignment between the BRI routes and Mackinder's assumptions, showing how this massive project fulfills China's long-term strategic goals of achieving global dominance.

Keywords : *China, Heartland Theory, Belt & Road Initiative, National Interest, Global Dominance*

Kontak Penulis

Janice Elysia

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62(361)223797, Fax: +62(361)701907

E-mail : elysiajanice19@gmail.com

PENDAHULUAN

Reformasi ekonomi Tiongkok dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Presiden Deng Xiaoping yang membawa Tiongkok menjadi negara adidaya dengan kekuatan masif seperti saat ini. Reformasi ini membuka perekonomian Tiongkok dan meningkatkan teknologi serta menangani permasalahan struktural seperti infrastruktur dan ketidakstabilan politik (Stanzel et al., 2017). Salah satu kebijakan Tiongkok dalam upaya ekspansi ekonomi dan geopolitik adalah *Belt & Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh XI Jinping pada tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, mempererat kerjasama ekonomi, dan memperkuat hubungan antarnegara di kawasan. BRI terdiri dari dua bagian, ada *Silk Road Economic Belt* (SREB) dan *21st Century Maritime Road* yang dirancang untuk menciptakan koridor ekonomi baru yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai negara di Eurasia dan kawasan lainnya (Rolland, 2017).

Dalam konteks teori *heartland*, penyebutan *pivot point* tidak secara eksplisit digunakan untuk mendefinisikan Lokasi tertentu, tetapi *pivot point* modern yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah wilayah Asia Tengah. Kawasan ini dinilai sebagai wilayah yang krusial oleh negara besar seperti Tiongkok, AS, Rusia, dan Uni Eropa dengan sumber daya alam yang melimpah (Scott & Alcenat, 2008). Selain itu, Asia Tengah juga menawarkan jalur transportasi dan perdagangan yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa sekaligus memberikan akses aman ke Samudera Pasifik (Zhuangzhi, 2007). Ambisi besar Tiongkok melalui BRI bertujuan untuk membentuk koridor ekonomi dan mengamankan kekuatannya di Asia Tengah serta

memperkuat pengaruhnya terhadap jalur perdagangan darat dan keseimbangan geopolitik.

Meski demikian, banyak tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam melebarkan sayap pengaruhnya ke wilayah. Peyrouse (2017) menggarisbawahi aktor-aktor seperti Rusia dengan proyek *Eurasian Economic Union* (EAEU) yang memiliki objektif yang sama seperti BRI dan integrasinya menciptakan dinamika kompleks. Ada pula peran strategis Pakistan dalam koridor ekonomi Tiongkok Pakistan (CPEC) dan intervensi Uni Eropa yang semakin menambah kompleksitas geopolitik (Sacks, 2021). Dukungan finansial dari *Asian Development Bank* (ADB), *World Bank*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) juga menambah dinamika keuangan yang harus dihadapi Tiongkok (Brattberg & Soula, 2018). Terbentuknya jalur BRI didukung oleh kedua belah pihak karena saling menguntungkan. Asia Tengah dengan wilayahnya yang terisolasi dan terkurung daratan (*landlocked*) terbantu oleh kebijakan BRI yang memberikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Tiongkok di sisi lain dapat memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Dalam menganalisis ambisi dan upaya Tiongkok di kawasan, diperlukan bantuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membantu memberikan sudut pandang baru, maka dari itu penelitian ini mengacu pada beberapa literatur kunci dalam memahami dinamika kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) di wilayah Asia Tengah. Literatur pertama tulisan Anam & Ristiyani (2018) yang berjudul "*Kebijakan Belt & Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*" membahas kepentingan nasional Tiongkok dalam mencari jalur pasokan energi alternatif dari

Timur Tengah melalui Pakistan. Jalur alternatif yang dimaksud adalah jalur yang tidak melewati Laut Cina Selatan dan Selat Malaka yang rentan terhadap gangguan. Dalam literatur kedua yang berjudul *"Analisis Kepentingan Tiongkok Terhadap Asia Tengah Melalui Jalur Sutra Baru Rute Darat"*, Desmiari et al (2018) menganalisis kepentingan perdagangan dan ekonomi Tiongkok dalam upayanya mengakses pasar Eropa melalui *Silk Road Economic Belt* (SREB) dan menekankan pada pentingnya stabilitas wilayah Xinjiang bagi kepentingan Tiongkok.

Literatur selanjutnya yang menjadi kunci dalam penelitian ini adalah milik Khan & Javaid (2018) yang berjudul *"Central Asia Region: A Hub of Chinese Interest"*. Literatur ini menyoroti potensi keuntungan ekonomi dan politik yang didapat Tiongkok dari kerjasamanya dengan negara-negara di kawasan sekaligus menekankan pada tantangan yang dihadapi Tiongkok atas instabilitas politik di wilayah tersebut pasca runtuhnya Uni Soviet. Literatur keempat yang digunakan adalah tulisan milik Harper (2019) dengan judul *"China's Eurasia: The Belt & Road Initiative and the Creation of a New Eurasian Power"* yang menggunakan perspektif teori *heartland* dalam menekankan pentingnya Asia Tengah dalam strategi geopolitik Tiongkok dan membuktikan hegemoni Tiongkok, Rusia, dan AS di wilayah Asia Tengah. Terakhir, Zhuangzhi (2007) dalam tulisannya yang berjudul *"The Relationship between China and Central Asia"* dalam buku *Eager Eyes Fixed on Eurasia: Russia and its Neighbors in Crisis* menekankan pentingnya kerjasama ekonomi dan keamanan antara Tiongkok dan Asia Tengah, pentingnya hubungan historis dan kontemporer antara Tiongkok dan Asia Tengah dalam berbagai aspek, serta menunjukkan bagaimana

kebijakan BRI meningkatkan stabilitas regional. Zhuangzhi juga melihat peran SCO dalam mendukung kerjasama regional dan keamanan di kawasan. Setiap literatur yang digunakan membantu penulis membangun perspektif dalam menyusun kerangka pemikiran untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok untuk meraih kepentingannya di Asia Tengah melalui implementasi kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI).

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana upaya Tiongkok melalui strategi ambisius *Belt & Road* (BRI) dalam memperkuat pengaruhnya dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Hal-hal ini akan diungkap menggunakan bantuan teori *heartland* dan konsep kepentingan nasional untuk menilai relevansi wilayah Asia Tengah sebagai *pivot point* dalam implementasi kebijakan BRI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif eksplanatif yang bersumber dari data sekunder, yakni dokumen-dokumen, jurnal, serta sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari situs resmi pemerintahan Tiongkok, situs resmi World Bank, China Briefing, serta artikel yang berkaitan dengan kepentingan nasional Tiongkok dan kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI). Dengan melihat pola interaksi yang terbangun berdasarkan infrastruktur konektivitas antara Tiongkok dan aktor-aktor negara maupun non-negara di wilayah Asia Tengah yang terlibat dalam tatanan sistem internasional sebagai unit analisis, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik reduksi data. Teknik

ini digunakan untuk menganalisis data secara induktif dan disusun dengan runtut. Data yang diperoleh dalam bentuk tabel, gambar, serta pernyataan para ahli untuk memaparkan upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mencapai kepentingannya kemudian dijelaskan secara sistematis dan terstruktur dalam uraian naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kewilayahan Asia Tengah

Tiongkok menggunakan kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah yang dinilai strategis menurut teori *heartland*. Signifikansi wilayah ini, terutama wilayah Laut Kaspia, yang dilihat dari perspektif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Uni Eropa (UE). Laut Kaspia yang adalah perairan tertutup terbesar di dunia yang dikelilingi lima negara pesisir, yakni Iran, Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Turkmenistan (Pietkiewicz, 2021). Wilayah ini memiliki cadangan sumber daya seperti minyak bumi dan gas yang melimpah, ada pula cadangan ikan termasuk 90% ikan *sturgeon* dan stok kaviar yang melimpah (Pietkiewicz, 2021). Permasalahan *overfishing*, penemuan cadangan minyak bumi, dan eksploitasi ini menjadi permasalahan baru di wilayah Laut Kaspia yang memerlukan negosiasi antarnegara pesisir.

Status hukum Laut Kaspia masih diperdebatkan hingga kini, dengan kemungkinan jika dianggap sebagai laut, maka UNCLOS akan berlaku dan memungkinkan eksploitasi dilakukan oleh seluruh negara pesisir dan Perusahaan multinasional. Namun, jika dianggap sebagai danau, pembagian sumber daya akan diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Namun, implementasinya

tidak semudah itu karena perbedaan ini tidak hanya bersifat semantik, tetapi memiliki implikasi dalam berbagai aspek dan alasan historis yang memperumit. Pada tahun 2018, kelima negara pesisir menandatangani Konvensi Status Hukum Laut Kaspia yang memberikan status hukum khusus pada wilayah ini dengan tidak menyebutnya sebagai danau maupun laut. Masing-masing negara diberikan perairan kedaulatan sepanjang 15 mil dan tambahan 10 mil, serta hak veto atas eksploitasi energi (Ballard, 2019). Meski demikian, masih banyak isu-isu seperti demarkasi batas maritim dan eksploitasi dasar laut yang belum diselesaikan dan berpotensi menimbulkan konflik (Debates, 2018).

Uni Eropa melihat wilayah Laut Kaspia sebagai jalur transit strategis untuk energi, khususnya minyak dan gas, dan berusaha untuk meningkatkan kerjasama energi dengan negara-negara pesisir. UE mendorong diversifikasi energi dan peningkatan infrastruktur transportasi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia. Keterlibatan UE mencakup kerjasama energi, peningkatan konektivitas regional, perdagangan, dan pembangunan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa meski UNCLOS sudah memberi kerangka kerja dalam mengelola perairan internasional Laut Kaspia, implementasinya masih belum pasti karena dinamika geopolitik dan perjanjian historis yang kompleks. Negara-negara pesisir harus menegaskan kembali hak-hak mereka melalui negosiasi diplomatik dan politik kekuasaan yang berpotensi menimbulkan konflik dan instabilitas. Wilayah Laut Kaspia dinilai signifikan dalam penelitian ini karena teori *heartland* melihat wilayah ini sebagai titik

fokus kekuasaan global dan kepentingan ekonomi strategis.

Signifikansi Asia Tengah bagi Tiongkok

Sejak Presiden Xi Jinping mengemukakan kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) yang kini dikenal sebagai *Belt & Road Initiative* (BRI), Asia Tengah dipilih sebagai fokus utama karena berbagai kepentingan strategis Tiongkok. Wilayah ini tidak hanya penting secara geografis tetapi juga geopolitik, sesuai dengan teori *heartland* yang menghubungkan kepentingan Tiongkok di Asia Tengah. Posisi Asia Tengah yang strategis memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya dan mengamankan sumber daya serta jalur perdagangan vital.

Secara ekonomi, Asia Tengah menawarkan banyak peluang bagi Tiongkok melalui sumber daya alamnya yang melimpah seperti mineral, emas, kapas, dan minyak bumi (Melnikovová, 2020). Tiongkok juga menggencarkan investasi-investasi dalam proyek infrastruktur seperti jalur kereta api, pipa gas, dan jalan raya untuk membantu meningkatkan konektivitas dan menegaskan posisi Tiongkok sebagai mitra dagang utama di wilayah Asia Tengah (Wolff, 2023). Menurut data yang dihimpun dari tim *China Briefing* (2021), Tiongkok adalah mitra dagang terbesar di negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Tiongkok juga adalah mitra yang penting bagi Kirgizstan dan Tajikistan dengan perdagangan yang mencakup berbagai komoditas seperti minyak, gas, dan produk manufaktur.

Selain aspek ekonomi, geopolitik juga menjadi poin penting dalam pertimbangan. Asia Tengah terletak di antara negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Eropa yang menjadikannya titik penting dalam persaingan geopolitik.

Keterlibatan Tiongkok di kawasan melalui diplomasi dan bantuan keuangan bertujuan untuk memperluas pengaruhnya dan mengimbangi kekuatan regional lainnya, terutama kekuatan Rusia (Cipto, 2018). Proyek infrastruktur yang dibangun melalui BRI diharapkan dapat membantu Asia Tengah bertransformasi menjadi pusat transportasi di Eurasia (Dadabayev, 2018 dalam Melnikovová, 2020).

Aspek keamanan dapat dikatakan sebagai salah satu prioritas Tiongkok di wilayah Asia Tengah. Wilayah ini seringkali mengalami instabilitas politik dan ekonomi karena adanya ancaman separatisme, terorisme, dan ekstremisme agama yang memiliki potensi untuk mengganggu kestabilan wilayah Xinjiang di Tiongkok. Salah satu upaya yang dikerahkan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah melalui organisasi bentukannya yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) untuk membantu menjaga stabilitas regional (International Crisis Group, 2013).

Dari segi budaya, Tiongkok berupaya menghidupkan kembali warisan Jalur Sutra Kuno melalui diplomasi budaya dan pertukaran pendidikan sebagai salah satu tujuan BRI. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat ikatan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tengah serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya bersama (Eberle et al., 2018). Diplomasi budaya adalah salah satu cara Tiongkok mencapai kepentingan nasional ideologinya di kawasan.

Dapat disimpulkan bahwa Asia Tengah memainkan peran strategis dalam visi Tiongkok membangun koridor ekonomi Eurasia melalui kebijakan BRI. Tiongkok

memanfaatkan berbagai aspek dari aset ekonomi, posisi geopolitik, ancaman keamanan, serta Sejarah kebudayaan untuk membantu memperkuat pengaruh dan mengarahkan Pembangunan sesuai dengan kepentingan strategisnya. Hubungan-hubungan kepentingan ini akan dikorelasikan dengan teori *heartland* dalam analisis untuk memahami dinamika yang mendalam.

Dinamika Aktor di Wilayah Asia Tengah

Asia Tengah menjadi *pivot point* dalam kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) Tiongkok karena letaknya yang strategis di jantung Eurasia dan kekayaan sumber dayanya. Teori *heartland* untuk menganalisis persaingan geopolitik di wilayah yang menjadi titik krusial dalam perebutan dominasi global. Tiongkok memanfaatkan hubungan simbiosis mutualisme dalam aspek perdagangan dan investasi dengan negara di Asia Tengah. Jumlah perdagangan antara Tiongkok dan Asia Tengah meningkat signifikan dari US\$1.7 miliar pada tahun 2000 menjadi hampir US\$40 miliar pada tahun 2019, menjadikan Tiongkok mitra dagang utama di kawasan ini, kecuali di Kazakhstan yang lebih mengutamakan Rusia (Sim & Aminjonov, 2022).

BRI mengubah pandangan dunia terhadap Asia Tengah dari yang *landlocked* atau terisolasi menjadi *land-linked* dan *linked in* (Sim & Aminjonov, 2022). Wilayah Asia Tengah kini dilihat sebagai medan pertempuran geopolitik, terutama antara Rusia dan Tiongkok. Investasi yang dikeluarkan Tiongkok dalam infrastruktur, energi, dan perdagangan di Asia Tengah mengalami peningkatan signifikan yang mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap ambisi strategisnya di kawasan. Hal ini menunjukkan upaya Tiongkok

menyeimbangkan pengaruh Rusia yang secara historis mendominasi wilayah melalui kerjasama keamanan dan ekonomi. Rusia mempertahankan pengaruhnya di kawasan melalui organisasi seperti *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) dan *Eurasian Economic Union* (EAEU). Meski demikian, proyek milik Rusia ini kalah dengan BRI yang lebih berhasil menarik negara-negara Asia Tengah dengan janji-janji investasi konkret. Lebih lanjut lagi, invasi Rusia ke Ukraina turut memperburuk citra Rusia di mata negara-negara di wilayah Asia Tengah dan menggagalkan proyek buatan Rusia di Asia Tengah seperti CSTO dan EAEU. Hal ini menguntungkan posisi Tiongkok di kawasan dan persaingan antara dua kekuatan besar di kawasan akan terus memengaruhi dinamika geopolitik di Asia Tengah (Abdoubayetova, 2020).

Selanjutnya, ada Uni Eropa (UE) yang juga memiliki kepentingan di Asia Tengah, terutama dalam bidang energi dan perdagangan. Kepentingan ini terlihat jelas dari upaya UE melalui inisiatif *Eastern Partnership* yang berupaya menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tengah untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan (European Commission, 2019). UE menekankan pentingnya kerjasama multilateral dan keterlibatan negara-negara Asia Tengah dalam forum regional untuk menjaga hukum internasional dan tatanan global.

Negara seperti Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kawasan melalui proyek BRI. Selain itu, Iran dan Pakistan juga memiliki peranan strategis dalam

kebijakan BRI Tiongkok. Iran, dengan posisi geografis yang strategis menjadi penghubung penting antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah dalam proyek investasi Tiongkok (Shariatnia & Azizi, 2019). Pakistan melalui koridor ekonomi *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) meningkatkan konektivitas dan perkembangan ekonomi yang sejalan dengan visi BRI Tiongkok. Koridor ini terletak di sepanjang jalur perdagangan utama yang berbatasan langsung dengan provinsi Xinjiang yang menjadi jembatan penghubung Tiongkok ke Laut Arab dan Samudera Hindia (Sacks, 2021). Dinamika ini menunjukkan kompleksitas aktor-aktor yang terlibat di Asia Tengah dan dampaknya terhadap keamanan dan pembangunan regional.

Kesesuaian Posisi Peta *Belt & Road Initiative* (BRI) dengan Asumsi Mackinder

Tiongkok saat ini adalah salah satu negara adidaya terbesar di dunia dengan pengaruh yang semakin besar dalam aspek geografis, populasi, ekonomi, hingga pengaruh militer. Salah satu upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya adalah melalui kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa. Tiongkok menjadi kekuatan baru yang menantang AS dan memperluas pengaruhnya di kawasan, yang dianggap strategis dalam teori *heartland* yang dikemukakan Mackinder pada awal abad ke-20 (Knutsen, 2014). Teori *heartland* milik Mackinder ini menekankan pada kekuatan global terletak pada kontrol atas Eurasia yang kaya akan sumber daya dan memiliki signifikansi secara geostrategis.

Kebijakan BRI dianggap sebagai strategi Tiongkok menciptakan ketergantungan ekonomi negara-negara lain terhadapnya, serupa dengan Marshall Plan AS membangun ketergantungan negara Eropa pasca Perang Dunia II. Selain itu, kebijakan ini dinilai sebagai salah satu kebijakan luar negeri paling masif dan terbukti meningkatkan nama Tiongkok di dunia internasional di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Menurut Santos (1970), ketergantungan terjadi ketika perkembangan ekonomi satu negara dikondisikan oleh perkembangan negara lain yang lebih dominan. Hal ini tercermin dalam BRI yang mana investasi Tiongkok dalam infrastruktur negara-negara Asia Tengah tidak hanya meningkatkan ekonomi melainkan juga menciptakan ketergantungan pada Tiongkok.

Proyek BRI adalah modernisasi Jalur Sutera Kuno yang pernah menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Proyek-proyek dalam lingkup BRI ini meliputi jalur kereta api, jalan raya, dan Pelabuhan yang menghubungkan Tiongkok ke berbagai negara. Peta jalur BRI menunjukkan rute yang sejalan dengan lingkup wilayah *heartland* menurut Mackinder, menegaskan ambisi geostrategis Tiongkok di Asia Tengah (Chohan, 2017). Ini melibatkan investasi signifikan dalam energi dan infrastruktur transportasi, yang memungkinkan Tiongkok mengakses sumber daya dan pasar dengan lebih efektif.

Jalur kereta api Tiongkok-Kirgizstan-Uzbekistan (CKU) dan jalur pipa gas Turkmenistan-Tiongkok adalah dua contoh proyek konektivitas yang semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai mitra di kawasan. Sebagai contoh, jalur pipa gas Turkmenistan-Tiongkok yang dibangun

sepanjang 2.000 km ini bekerjasama dengan Uzbekistan dan Kazakhstan sejak 2007 (Cipto, 2018). Jalur pipa gas ini memungkinkan Tiongkok untuk membeli gas alam dengan harga yang lebih rendah karena tidak harus melewati jalur laut yang mahal. Jalur pipa ini semakin memperlemah dominasi Rusia di kawasan (Cipto, 2018). Selain itu, jalur kereta api CKU membantu mengurangi waktu pengiriman antara Tiongkok dan Eropa, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transportasi. Melansir artikel Indonesia Window (2023), terhitung pada tahun 2022, jalur ini sudah memasok sekitar 43,2 miliar meter kubik gas alam untuk menyuplai kebutuhan energi bagi lebih dari 500 juta penduduk di Tiongkok.

Ada pula koridor-koridor ekonomi yang dibangun di bawah BRI, seperti *New Eurasian Land-bridge* dan *China-Central Asia-West Asia*, yang menunjukkan kepentingan Tiongkok dalam meningkatkan konektivitas dan perdagangan dengan Eropa dan Asia Barat dengan melewati Asia Tengah. Rute yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah rute yang didominasi oleh jalur kereta api yang membentang dari Tiongkok-Kirgizstan-Uzbekistan-Turkmenistan-Iran-Asia Barat dan India yang penting dalam meningkatkan konektivitas melalui jaringan transportasi darat regional dalam proyek *Belt & Road Initiative* (BRI) milik Xi Jinping. Rute ini melewati jalur Irkeshtam yang adalah jalur perbatasan antara Kirgizstan (Osh-Sary Tash) dengan Tiongkok (Kashgar). Dimulai dari wilayah Kashgar di Tiongkok, kemudian membentang menuju wilayah Irkeshtam dan Osh di Kirgizstan dengan menggunakan jalur darat. Kemudian dengan menggunakan jalur kereta api menuju wilayah Andijan, Pap, Tashkent,

Samarkand, dan Navoi di Uzbekistan, wilayah Mary dan Serakhs di Turkmenistan dan wilayah Sarakhs dan Mashad di Iran. Dari wilayah Iran kemudian menuju wilayah Asia Barat dan India melalui Bandar Abbas. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa koridor ini bertujuan untuk memposisikan negara-negara Asia Tengah sebagai pusat transit penting untuk perdagangan ini, sehingga mendorong pembangunan di negara-negara tersebut (Cai & Nolan, 2019).

Koridor selanjutnya adalah *New Eurasian Land-bridge* yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa melalui negara-negara di wilayah Asia Tengah. Salah satu rute dalam koridor ini adalah rute kereta api yang membentang dari Tiongkok-Kazakhstan-Rusia-Belarus-Polandia-Jerman hingga ke kota-kota lainnya di Eropa. Rute kereta api ini menghubungkan kota Urumqi dan Alashankhou di Tiongkok dengan wilayah Dostyk, Mointy, Nur-Sultan, dan Petropavl di Kazakhstan lalu Yekaterinburg dan Moskow di Rusia. Dari Rusia, kereta ini terhubung ke wilayah Brest di Belarus dan Malaszewicze di Polandia. Terakhir, rute ini ditutup dengan pemberhentian terakhir yaitu wilayah Duisburg di Jerman dan kota-kota lain di wilayah Eropa. Koridor ini dibangun dengan kepentingan untuk kerjasama industri, peningkatan investasi, liberalisasi perdagangan, serta memfasilitasi perdagangan yang bebas hambatan dan efisien antara Tiongkok dan Eropa (Cai & Nolan, 2019).

Koridor terakhir yang dibahas adalah *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Koridor ini semakin mempererat hubungan perdagangan antara kedua negara ini sejak penandatanganan kontrak perdagangan bebas sepuluh tahun lalu. Koridor yang

terbangun sepanjang 3.218 km menghubungkan Provinsi Xinjiang ke Pelabuhan Gwadar dengan tujuan bersama untuk mengimbangi kekuatan India (Aryaguna, 2021). Pembangunan ini melibatkan modernisasi jalur darat, jalan raya, dan rel kereta api, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai ancaman terorisme, separatisme, dan isu korupsi di Pakistan (Luft, 2016). Koridor-koridor ini membuktikan tujuan terbentuknya kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI) yaitu untuk menciptakan rute perdagangan dan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Eurasia atau *pivot point heartland*. Hal ini dilakukan tidak hanya meningkatkan konektivitas, melainkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat berimplikasi ke banyak aspek lainnya, seperti meningkatkan kestabilan politik di kawasan (Haenle, 2017).

Teori *Heartland* milik Mackinder yang dipaparkan dalam bab ini menjawab pertanyaan mengenai alasan mengapa Asia Tengah dijadikan *pivot point* Tiongkok dalam proyek investasi masif *Belt & Road Initiative* (BRI) ini, yaitu bagaimana secara geografis wilayah-wilayah yang terbangun jalur konektivitas semuanya masuk ke dalam bagian *World Island* yang mana sejalan dengan keinginan dan kepentingan nasional Tiongkok, yaitu untuk mencapai dominasi global. Dengan jaringan perdagangan yang berada di bawah kendali Tiongkok dan mencakup hampir seluruh wilayah dengan daratan Tiongkok sebagai pusatnya, tentu saja ini menjadi tanda yang signifikan bahwa Tiongkok mendominasi wilayah Eurasia.

Manuver Tiongkok melalui Kebijakan *Belt & Road Initiative* (BRI)

Tiongkok telah menetapkan langkah-langkah strategis yang kokoh untuk mencapai status superpower dan dominasi global. Dengan mengintegrasikan aspek militer, politik, ekonomi, dan budaya, Tiongkok mengikuti jalan yang diuraikan oleh Miller (2005) dalam Chun (2016) untuk mencapai hegemoni global. Pemikiran ini bukanlah gagasan baru, melainkan telah tertanam sejak era Deng Xiaoping. Deng memulai reformasi ekonomi dan membuka Tiongkok pada peluang internasional, tetapi dengan kebijakan "*tao guang yang hui* (韬光养晦)" yang menyarankan agar Tiongkok tidak terlalu mencolok di panggung internasional. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan luar negeri berikutnya, seperti "China's Peaceful Development" di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan kemudian "The China Dream" yang diperkenalkan oleh Xi Jinping, Tiongkok kembali menegaskan ambisinya sebagai negara superpower. Ada tiga manuver yang dilakukan Tiongkok di wilayah Asia Tengah untuk membantu mencapai kepentingannya.

a. *Shanghai Cooperation Organization* (SCO)

Organisasi keamanan buatan Tiongkok ini menjadi salah satu alat Tiongkok mencapai kepentingan keamanannya di wilayah Asia Tengah. Organisasi ini berfokus pada peningkatan keamanan regional, pemberantasan terorisme, separatisme, ekstremisme dan pengembangan kerjasama ekonomi. Pembentukan SCO bermula dari Shanghai Five pada 1996 dengan anggota Tiongkok, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Rusia, sebelum berubah menjadi 2001 dan ada penambahan Uzbekistan. SCO

semakin berkembang dengan tambahan anggota negara-negara seperti Pakistan, Iran, dan India turut memperluas pengaruh organisasi meskipun sering menimbulkan ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan Rusia. Meski demikian, integrasi ekonomi melalui proyek-proyek seperti koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) dan pembangunan infrastruktur lintas negara menunjukkan bahwa SCO berperan penting dalam mendukung tujuan BRI dan stabilitas regional (Oguz & Karabulut, 2022). Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat membantu Tiongkok dalam mencapai kepentingan keamanan nasional dan ideologi, terutama di wilayah strategis seperti Xinjiang, serta memerangi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba.

b. *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*

Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menjadi tonggak penting dalam peran Tiongkok dalam skenario keuangan internasional. Dimulai dari kunjungan Presiden Xi Jinping ke Asia Tenggara pada 2013, AIIB bergerak maju melalui proses konsultasi multilateral dan bilateral yang melibatkan 21 negara anggota pendiri. Dengan keanggotaan yang semakin membesar, AIIB menjadi instrumen yang memperkuat pengaruh Tiongkok di Asia dan di dunia. Berdasarkan data resmi AIIB, 109 negara telah menjadi bagian dari lembaga ini, menegaskan pengaruh global Tiongkok.

Tiongkok memiliki alasan kuat dalam pembentukan AIIB. Yang pertama, pembentukan AIIB oleh Tiongkok bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Asia yang memerlukan dana lebih dari US\$8 triliun per tahun selama sepuluh tahun ke depan (Asian Development Bank, 2013). Dengan dana cadangan AIIB sebesar US\$100 miliar dan tambahan dana dari Tiongkok sebesar US\$3.5 triliun, AIIB menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih longgar dibandingkan *World Bank*. AIIB juga dibentuk sebagai respons terhadap minimnya peran Tiongkok dalam lembaga-lembaga Bretton Woods, yang dipengaruhi oleh upaya AS untuk membatasi pengaruh Tiongkok. Terakhir, AIIB menjadi alat politik Tiongkok untuk menantang dominasi AS dalam bidang keuangan internasional, dengan menciptakan alternatif terhadap lembaga-lembaga *Bretton Woods* seperti IMF dan *World Bank*, serta mempromosikan prinsip "*Beijing Consensus*" sebagai alternatif dari "*Washington Consensus*", mendukung BUMN, reformasi ekonomi bertahap, dan non-intervensi (Chow, 2016). Meski menghadapi kritik terkait transparansi dan diplomasi jebakan utang, AIIB menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya dan menciptakan dinamika baru dalam keuangan global.

c. *New Asian Security Concept*

Proyek Belt & Road Initiative (BRI) Tiongkok berhasil melibatkan berbagai negara dari seluruh benua. Selain aspek infrastruktur dan finansial, New Asian Security Concept (NASC) juga menjadi kunci keberhasilan BRI. NASC, yang muncul pasca Perang Dingin, berupaya menciptakan kerangka keamanan kooperatif di Asia, mengatasi dominasi Barat yang telah menguasai kawasan ini selama 70 tahun terakhir. Kerangka keamanan yang diterapkan oleh AS melalui aliansi militer seringkali tidak sesuai dengan dinamika regional Asia dan hanya memperburuk stabilitas kawasan (Zhida, 2014).

Tiongkok menggunakan NASC untuk mempromosikan keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama regional dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Presiden Xi Jinping, dalam pidatonya di Shanghai pada 2014, menekankan pentingnya membangun sistem keamanan yang kooperatif dan berkelanjutan di Asia. Dengan NASC, Tiongkok berusaha mengurangi pengaruh AS di kawasan, meningkatkan stabilitas regional, dan mendukung proyek BRI. NASC memperlihatkan upaya Tiongkok untuk menjadi pemimpin regional yang mendorong kerjasama kolektif, yang tidak hanya menguntungkan keamanan tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antar negara di Asia.

Penelitian ini mengeksplorasi ambisi Tiongkok mencapai dominasi global melalui kebijakan Belt & Road Initiative (BRI) dan keterkaitannya dengan teori heartland. Keselarasan geografis antara rute BRI dan wilayah heartland Mackinder menunjukkan tujuan strategis jangka panjang Tiongkok. Jaringan BRI yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Asia, dan Afrika menjadi jalur penting untuk mencapai pengaruh global. Upaya ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan Barat dan memperkuat kepemimpinan ekonomi Tiongkok, serta Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang memfokuskan pada isu keamanan di Asia Tengah untuk menciptakan lingkungan stabil bagi proyek BRI.

Strategi Tiongkok juga mencakup New Asian Security Concept (NASC) yang mempromosikan kerangka keamanan kooperatif, mengurangi pengaruh AS, dan memperkuat kepentingan nasional Tiongkok dalam bidang keamanan dan tatanan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BRI adalah alat multifaset untuk memperkuat pengaruh Tiongkok, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mencapai dominasi geopolitik di Eurasia, khususnya Asia Tengah. Meskipun menghadapi tantangan seperti beban utang dan potensi ikatan politik, BRI berfungsi untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik di kawasan, memupuk kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Implementasi kebijakan BRI di Asia Tengah melibatkan upaya panjang dan dukungan lembaga-lembaga yang mendukung ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan dominan global.

PENUTUP

Daftar Pustaka

- Abdoubayetova, A. (Ed.). (2020). *China's Belt and Road Initiative in Central Asia: Ambitions, Risks and Realities Special Issue* 2. Diakses melalui https://www.osce-academy.net/upload/file/BRI_08_07.pdf, pada 3 Oktober 2023
- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2.842.217-236>
- Aryaguna, A. (2021). MEMANFAATKAN ONE BELT ONE ROAD: KEPENTINGAN EKONOMI PAKISTAN DALAM CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR TAHUN 2015-2020 [Thesis].
- Azizi, S. (2024). China's Belt and Road Initiative (BRI): The Role of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Geopolitical Security and Economic Cooperation. *Open Journal of Political Science*, 14(1), 111–129. <https://doi.org/10.4236/ojps.2024.141007>
- Ballard, B. (2019). More than sea-mantics: the legal status of the Caspian Sea. www.businessdestinations.com, Diakses melalui <https://www.businessdestinations.com/destinations/more-than-sea-mantics-the-legal-status-of-the-caspian-sea/>, pada 6 Februari 2024
- Bank, A. D. (2013, September 30). *Who Will Pay for Asia's \$8 Trillion Infrastructure Gap?* [Www.adb.org](http://www.adb.org). Diakses melalui <https://www.adb.org/news/infographics/who-will-pay-asias-8-trillion-infrastructure-gap>, pada 22 Maret 2024
- Brattberg, E., & Soula, E. (2018, October 2019). *Europe's Emerging Approach to China's Belt and Road Initiative*. Carnegie Endowment for International Peace, Diakses melalui <https://carnegieendowment.org/2018/10/19/europe-s-emerging-approach-to-china-s-belt-and-road-initiative-pub-77536>, pada 1 November 2023
- Briefing, C. (2021, Mei 20). *China and Central Asia: Bilateral Trade Relationships and Future Outlook*. China Briefing News, Diakses melalui <https://www.china-briefing.com/news/china-and-central-asia-bilateral-trade-relationships-and-future-outlook/>, pada 3 Oktober 2023
- Cai, F., & Nolan, P. (2019). *Routledge handbook of the Belt and Road* (1st ed., pp. 202–212; 218–222). Routledge/Taylor & Francis Group.
- Chohan, U. W. (2017). What Is One Belt One Road? A Surplus Recycling Mechanism Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2997650>
- Chow, D. (2016). Why China Established the Asia Infrastructure Investment Bank. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 49(5). <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol49/iss5/2>
- Chun, K. H. (2016). *The BRICs Superpower Challenge : Foreign and Security Policy Analysis*. Routledge.
- Cipto, B. (2018). *Strategi China Merebut Status Superpower*. Pustaka Pelajar.
- Debates, R. (2018). *Caspian agreement: Many issues still to be settled*. Orfonline.org., Diakses melalui

- <https://www.orfonline.org/expert-speak/caspian-agreement-many-issues-still-to-be-settled-44871>, pada 6 Februari 2024
- Desmiari, N. W. P. E., Sushanti, S., & Resen, P. T. K. (2018). *ANALISIS KEPENTINGAN TIONGKOK TERHADAP ASIA TENGAH MELALUI JALUR SUTRA BARU RUTE DARAT*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/38587>
- Eberle, P., Bradley, T., & Tafeore, A. (2018). A cultural perspective. *Journal of International Business and Cultural Studies*, 12, Diakses melalui <https://www.aabri.com/manuscript/s/193067.pdf> pada 29 Januari 2024
- Haenle, P. (2017). *Xi's Vision for China's Belt and Road Initiative*. Carnegie Endowment for International Peace. Diakses melalui <https://carnegieendowment.org/2017/05/09/xi-s-vision-for-china-s-belt-and-road-initiative-pub-69890>, pada 20 Maret 2024
- Harper, T. (2019). China's Eurasia: the Belt and Road Initiative and the Creation of a New Eurasian Power. *The Chinese Journal of Global Governance*, 5(2), 99–121. <https://doi.org/10.1163/23525207-12340039>
- International Crisis Group. (2013). *China's Central Asia Problem*. <https://www.refworld.org/reference/countryrep/icg/2013/en/90885>
- Joint Communication to the European Parliament and the Council The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership. (2019). Diakses melalui https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_the_eu_and_central_asia - https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_the_eu_and_central_asia
- [new opportunities for a stronger partnership.pdf](https://www.researchgate.net/publication/327882395_Central_Asia_region_A_hub_of_Chinese_interest) pada 13 Februari 2024
- Khan, S., & Javaid, F. (2018). *Central Asia region: A hub of Chinese interest*. *Central Asia region: A hub of Chinese interest*.
https://www.researchgate.net/publication/327882395_Central_Asia_region_A_hub_of_Chinese_interest
- Knutsen, T. L. (2014). Halford J. Mackinder, Geopolitics, and the Heartland Thesis. *The International History Review*, 36(5), 835–857. <https://doi.org/10.1080/07075332.2014.941904>
- Melnikovová, L. (2020). China's interests in Central Asian economies. *Human Affairs*, 30(2), 239–252. <https://doi.org/10.1515/humaff-2020-0022>
- Oguz, S., & Karabulut, B. (2022). The Rise of Shanghai Cooperation Organization in Central Asia: Is It Tool of Cooperation or Competition between Russia and China on Turkic States? *Cappadocia Journal of Area Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.38154/cjas.54>
- Peyrouse, S. (2017). The Evolution of Russia's Views on the Belt and Road Initiative. *Asia Policy*, 24(1), 96–102. <https://doi.org/10.1353/asp.2017.0026>
- Pietkiewicz, M. (2021). Legal status of Caspian Sea – problem solved? *Marine Policy*, 123, 104321. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104321>
- Rolland, N. (2017). *China's Belt and Road Initiative: Political and Strategic Implications of a Chinese-led Regional Infrastructure - The National Bureau of Asian Research (NBR)*. The

- National Bureau of Asian Research (NBR). Diakses melalui <https://www.nbr.org/program/china-as-belt-and-road-initiative-political-and-strategic-implications-of-a-chinese-led-regional-infrastructure/>, pada 3 Oktober 2023
- Sacks, D. (2021, Maret 30). *The China-Pakistan Economic Corridor—Hard Reality Greets BRI's Signature Initiative*. Council on Foreign Relations, Diakses melalui <https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-bris-signature-initiative>, pada 1 November 2023
- Santos, T. D. (1970). The Structure of Dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231–236.
- Scott, M., & Alcenat, W. (2008). *Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory in Great Power Politics*.
- Shariatnia, M., & Azizi, H. (2019). Iran and the Belt and Road Initiative: Amid Hope and Fear. *Journal of Contemporary China*, 1–11. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1594108>
- Sim, L.-C., & Farkhod Aminjonov. (2022). Statecraft in the Steppes: Central Asia's Relations with China. *Journal of Contemporary China*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2136937>
- Stanzel, A., Jacob, J. T., Hart, M., & Rolland, N. (2017). *GRAND DESIGNS: DOES CHINA HAVE A "GRAND STRATEGY"?* European Council on Foreign Relations (ECFR).
- Window, I. (2023, January 7). *Jalur pipa gas China-Asia Tengah*. Indonesia Window. Diakses melalui <https://indonesiawindow.com/jalur-pipa-gas-china-asia-tengah-salurkan-432-miliar-meter-kubik-gas-pada-2022/>, pada 12 Maret 2024
- Wolff, S. (2023, May 24). *How China is increasing its influence in central Asia as part of global plans to offer an alternative to the west*. The Conversation, Diakses melalui <https://theconversation.com/how-china-is-increasing-its-influence-in-central-asia-as-part-of-global-plans-to-offer-an-alternative-to-the-west-206035>, pada 27 Januari 2024
- Zhida, J. (2014). *Asian Security Concept and Its Implications for Regional Order: From a Normative Perspective*. Diakses melalui [Www.ciis.org.cn](http://www.ciis.org.cn). https://www.ciis.org.cn/english/COMMENTARIES/202007/t20200715_2765.html, pada 25 Maret 2024
- Zhuangzhi, S. (2007). *Eager Eyes Fixed on Eurasia: Russia and its neighbors in crisis* (I. Akihiro, Ed.; pp. 41–63). Slavic Research Center.